

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI BANGKA BELITUNG**

Apta Sandhi Riandika

NPP. 30.0377

Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: apta.sndi@mail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Purpose: Political Education and provide space for the younger generation to be able to learn to be responsible in the public sphere for the welfare of the nation and state in the future. **Method:** This research was designed using a postpositivism paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD) semi qualitative. obtained through interviews, observation, and documentation and processed using the Manual Analysis Procedure (MDAP) analysis technique. The research uses Soerjono Soekanto's Political Education Theory (2007: 213) which consists of three dimensions, namely the Norm Dimension, the Communication Dimension and the Actor Dimension. **Result:** The results of this study indicate that the level of political education in Pangkalpinang City still needs improvement, political education has not had a significant impact on the implementation of political participation. **Conclusion:** Through this research, researchers suggest the need for regular and intense socialization, as well as good communication between the National Unity and Political Agency and the community, and involving the private sector in carrying out Political Education in order to optimize the role in carrying out Political Education and provide space for the younger generation to be able to learn to be responsible in the public sphere for the welfare of the nation and state in the future.

Keywords: Political Education, National Unity and Political Agency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang dengan tujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjalankan Pendidikan Politik agar mampu mengoptimalkan peran dalam menjalankan Pendidikan Politik serta memberi ruang bagi generasi muda supaya mampu belajar bertanggung jawab dalam ruang publik demi kesejahteraan bangsa dan negara kedepannya. **Metode:** Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan Quasi-Qualitative Desain (QQD) semi kualitati. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta di olah menggunakan teknik analisis Manual Data Analysisic Procedure (MDAP). Penelitian menggunakan Teori Pendidikan Politik dari Soerjono Soekanto (2007 : 213) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Dimensi Norma, Dimensi Komunikasi dan Dimensi Aktor. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pendidikan Politik yang di lakukan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan partisipasi politik. **Kesimpulan:** Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan Politik di Kota Pangkalpinang masih perlu pembenahan, Pendidikan Politik yang di lakukan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan partisipasi politik.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran serta pemahaman hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewasa ini berbagai kalangan masih belum mengetahui apa itu politik serta berpikir bahwa sistem politik bukanlah tugas pribadinya melainkan tugas yang dimiliki negara. Oleh sebab itu, masih banyak orang yang dirugikan dari diberikannya janji-janji manis oleh para calon pemimpin daerah yang sedang berkampanye. Pada kenyataannya, hal ini berdampak terhadap realita yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

Pendidikan politik dan politik itu sendiri sangat erat kaitannya. Karena keduanya syarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat. Sudah saatnya masyarakat sadar bahwa sistem politik diwujudkan ke dalam dunia nyata bukan melalui janji-janji manis atau program-program tanpa realisasi yang jelas oleh partai politik.

Pada dasarnya, pendidikan politik merupakan upaya rekonstruksi terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai diasumsikan oleh masyarakat sehingga pemerintah melalui programnya dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sesuai serta pembentukan sikap yang dibutuhkan agar masyarakat mampu menghadapi keadaan yang

sebenarnya terjadi tanpa terpengaruh oleh pihak mana pun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkal Pinang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas membidangi urusan politik dalam negeri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan politik, sejauh ini penyelenggaraan pendidikan politik sudah berjalan secara rutin namun jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 di Kota Pangkalpinang merepresentasikan bahwa pendidikan politik yang selama ini dilaksanakan tidak optimal sehingga perlu adanya peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kota Pangkalpinang,

peningkatan yang dimaksud yakni intensitas penyelenggaraan pendidikan politik, peningkatan SDM sebagai narasumber dalam penyelenggaraan politik. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti melihat pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat Kota Pangkalpinang guna mendukung upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik di Kota Pangkalpinang, dengan konsep inilah peneliti akan mengkaji secara ilmiah dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA PANGKALPINANG”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Pangkal Pinang salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi ataupun pemahaman politik masyarakat. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang sehingga masyarakat menjadi paham terkait dengan urgensi dari partisipasinya terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Pendidikan politik menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pendidikan politik merupakan proses pembelajaran

bahwa pendidikan politik merupakan bentuk pembelajaran serta pemahaman akan hak, kewajiban, dan merupakan tanggung jawab bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkal Pinang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas membidangi urusan politik dalam negeri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan politik, sejauh ini penyelenggaraan pendidikan politik sudah berjalan secara rutin namun jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 di Kota Pangkalpinang merepresentasikan bahwa pendidikan politik yang selama ini dilaksanakan tidak optimal sehingga perlu adanya peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kota Pangkalpinang, peningkatan yang dimaksud yakni intensitas penyelenggaraan pendidikan politik, peningkatan SDM sebagai narasumber dalam penyelenggaraan politik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pendidikan politik. Penelitian Rahmat Hidayat tahun 2020. Penelitian dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat” dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi dengan hasil penelitian menunjukkan keberhasilan Badan Kesbangpol dalam ikut serta menyukseskan Pilkada di NTB tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan Pilkada di NTB memanfaatkan setiap peluang koordinasi yang dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memperhitungkan komponen yang ada di dalam susunan pendukung Pilkada tersebut, serta melakukan pelaporan informasi secara bertahap dan berjenjang terkait perkembangan sebelum atau sesudah Pilkada dilakukan sehingga memperoleh hasil yang signifikan dan membawa kesuksesan dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi NTB. Penelitian Aulia Rahmawati (2018) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengangkat judul “Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kota Pekanbaru tahun 2017” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap oleh peneliti menggambarkan bagaimana fungsi KPU dalam Pilkada di Kota Pekanbaru, peneliti menjelaskan bahwa KPU Kota Pekanbaru belum menjalankan fungsinya dengan baik hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dimana rendahnya angka partisipasi pada Pilkada, hal tersebut dikarenakan kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti bahwa faktor yang menghambat adalah kurangnya biaya anggaran yang disediakan KPU dan terbatasnya waktu untuk melakukan sosialisasi. Peneliti juga menjelaskan terdapat beberapa upaya dari KPU Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti menggunakan maskot pada saat pemilu dilaksanakan dengan harapan bisa menarik pemilih karena keunikan yang dibuat oleh panitia KPU Kota Pekanbaru. Penelitian Iko Deswanda pada tahun 2018 dengan mengangkat judul “Peran Badan Kesbangpol Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif, penelitian tersebut menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam mewujudkan partisipasi politik yang cerdas dan berintegritas, penulis mendeskripsikan bahwa peran pemerintah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam menjalankan berbagai kegiatan yang direncanakan guna menciptakan partisipasi politik yang cerdas dan menjunjung tinggi integritas, peneliti juga mendeskripsikan bahwa pengoptimalan dari sumber daya yang ada di Badan Kesbangpol sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian Seputro Budi Pramono pada tahun 2006 yang merupakan dari Universitas Airlangga dengan mengangkat judul Peran “Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Stabilitas Politik”, peneliti menggunakan metode penelitian dan jenis penelitian pendekatan deskriptif, penelitian tersebut

menjelaskan bahwa penelitian bertujuan dilakukan untuk mengungkapkan gambaran secara rinci tentang peran pemerintah daerah saat berupaya memelihara stabilitas politik di Kabupaten Pasuruan. Dijelaskan oleh peneliti bahwa tujuan yang dicapai oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pasuruan telah terprogram dan telah direncanakan secara matang, dengan menjamin kebutuhan di setiap perencanaan program, peneliti menjelaskan bahwa melibatkan peran aktif dari masyarakat sangat penting yang berguna untuk menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti juga menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dari Badan Kesbangpol dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah (Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak teori yang digunakan, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan menggunakan tiga dimensi seperti dimensi norma, komunikasi, dan aktor. Selain itu terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan pada hasil penelitian sangat berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap peranan Badan Kesbangpol dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat di Kota Pangkajene Ardemas).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Badan Kesbangpol dalam meningkatkan Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kota Pangkajene Ardemas. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal dan faktor internal dari Badan Kesbangpol dalam meningkatkan Pendidikan Politik di Kota Pangkajene Ardemas. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Kota Pangkajene Ardemas dalam meningkatkan tingkat keberhasilan pendidikan politik di Kota Pangkajene Ardemas

II. METODE

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan Quasi-Qualitative Desain (QQD) semi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta di olah menggunakan teknik analisis Manual Data Analysis Procedure (MDAP). Penelitian menggunakan Teori Pendidikan Politik dari Soerjono Soekanto (2007 : 213) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Dimensi Norma, Dimensi Komunikasi dan Dimensi Aktor. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkajene Ardemas dengan tujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik terhadap masyarakat Kota Pangkajene Ardemas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik sample yang digunakan ialah snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Data dan informasi yang telah di kumpulkan di analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan Politik di Kota Pangkajene Ardemas

3.1. Normatif

Penulis melakukan pengukuran terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui dimensi Normatif, yang di maksud dalam proses pendidikan politik adalah proses dimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengarah kepada norma kenegaraan mengenai apa saja yang berkaitan dengan berjalannya pendidikan politik berdasarkan kebiasaan dan kelakuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah yang ada dalam Pancasila, dan berkaitan

dengan proses yang di selenggarakan pemerintah dalam pembinaan pendidikan politik agar berjalan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan tidak ada lagi yang menyalahgunakan unsur politik demi keuntungan pribadi.

Normatif yang di maksud dalam berlangsungnya Pendidikan Politik merupakan penerapan nilai menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengarah kepada norma kenegaraan mengenai apa saja yang berkaitan dengan berjalannya pendidikan politik berdasarkan kebiasaan dan kelakuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah yang ada dalam Pancasila, dan berkaitan dengan proses yang di selenggarakan pemerintah dalam pembinaan pendidikan politik agar berjalan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan tidak ada lagi yang menyalahgunakan unsur politik demi keuntungan pribadi.

a. Indikator Tata cara

Seperti yang dijelaskan pada tabel 4.5, berdasarkan pengamatan yang didapat oleh peneliti terkait pendidikan politik yang di jalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang bahwasanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendidikan politik terhadap masyarakat, maka sesuai dengan data yang di peroleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil menjalankan upaya yang telah di lakukan terhadap Pendidikan politik di Kota Pangkalpinang apabila dilihat melalui indikator tata cara yang di gunakan oleh peneliti sebagai bahan penelitian.

b. Indikator Kebiasaan

Berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana kekuasaan dapat berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan, maka kedudukan antara nilai-nilai kehidupan dan norma hukum harus sejajar dengan penormaannya dalam berpolitik, sehingga mampu mencakup tata cara peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk masyarakat berbangsa dan bernegara. Senada dengan yang dijelaskan pada tabel 4.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu berupaya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula secara berkala, maka dari itu sesuai dengan data yang di peroleh oleh peneliti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang dinilai melalui indikator kebiasaan dikatakan sudah berjalan secara terarah dan terstruktur dengan baik.

c. Indikator Tingkah Laku

Berpolitik dapat dikatakan berhasil sebagai perwujudan sistem demokrasi, apabila mampu mengubah pola pikir masyarakat agar peduli terhadap perkembangan sistem politik, serta peka akan pengaruh efek dari globalisasi yang perlahan merusak sistem ketatanegaraan. Menurut peneliti berpolitik yang benar adalah bagaimana peran masyarakat terhadap implementasi yang di berikan oleh pemerintah dengan kewenangan penuh di tangan pemerintah pusat dapat di sikapi dengan timbal balik yang baik oleh masyarakat, hal tersebut sesuai dengan yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan informan (i2) bapak Langkir Santoso, S.H. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang telah berhasil bila dilihat dengan indikator tingkah laku yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini.

3.2. Komunikasi

Dimensi Komunikasi merupakan suatu upaya yang di lakukan secara langsung sebagai cara untuk membentuk kesamaan didalam persepsi terkait permasalahan yang dihadapi. Komunikasi secara langsung atau bisa juga disebut dialog dibutuhkan para pihak yang berkepentingan untuk mengenali keuntungan satu sama lain. Berdasarkan observasi di lapangan, fasilitas yang di berikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pangkalpinang terkait Pendidikan Politik sudah bisa di bilang rutin di jalankan, hal tersebut ditujukan untuk memfasilitasi pemilih pemula di wilayah tersebut

untuk memperoleh pendidikan politik yang layak dan mampu menjalankan hak pilihnya dengan baik berdasarkan kaidah hidup berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi pendidikan politik adalah bentuk program yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam meningkatkan nilai-nilai dari pendidikan politik, sehingga masyarakat mampu memahami tujuan dari politik itu sendiri. Donald Tampubolon, A.P. M, Si, mengatakan bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini efektif apabila dilakukan jauh sebelum menjelangnya pemilihan karena dapat merubah pola pikir masyarakat dan memberikan gambaran kepada masyarakat baik dan buruknya jika menyalahgunakan hak suaranya dalam pemilihan nanti.

Dimensi Komunikasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan secara langsung sebagai cara untuk membentuk kesamaan didalam persepsi terkait permasalahan yang dihadapi. Komunikasi biasanya berbagai macam cara, seperti komunikasi 2 arah dan komunikasi satu arah.

Sesuai dengan apa yang peneliti amati menggunakan dimensi komunikasi terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka pertanyaannya adalah, sudah sesuai atau belum upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan Pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang, sebagai berikut;

a. Indikator Organisasi

Sebanding lurus dengan tabel 4.6 peran yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pengelolaan data terhadap organisasi masyarakat yang berperan dalam membantu jalannya pendidikan politik bisa dikatakan sudah berhasil sehingga menciptakan keuntungan yang mampu mempermudah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan pendidikan politik dengan bantuan dari pihak Organisasi Masyarakat. Terkait hal tersebut maka peneliti mengamati menggunakan indikator organisasi, melihat sisi positive yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga menurut hasil penelitian yang didapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Indikator Koordinasi

Sesuai dengan gambar 4.6 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap langkah koordinasi yang dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan langkah yang dinilai baik, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi maka diadakanlah pertemuan, dengan tujuan guna untuk mempersiapkan urusan pemilu di tahun 2024 dan merancang semua antisipasi yang akan terjadi di pemilu nantiinya. sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu 2024 dapat di atasi dengan baik melalui Pendidikan Politik. Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan titik yang dimana peranan Badan Kesatuan Bangsa Politik menggunakan indikator koordinasi sudah sesuai dengan tupoksi dan langkah yang tepat di ambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Indikator Interaksi

Interaksi secara garis besar dapat dikatakan sebagai upaya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan indikator interaksi yang di ambil peneliti dalam menjalankan penelitian terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan Politik di Kota Pangkalpinang peneliti menemukan sesuatu yang janggal antara

peran pemerintah dengan masyarakat, hal ini di tegaskan pada hasil penelitian yang di dapat oleh satu informan yaitu Pak Karim (i4) pada 13 Januari 2022 mengatakan “Saya tidak tau apa apa, cuman di suruh milih terus di kasih imbalan ya saya mau-mau aja, namanya juga rezeki masa saya tolak.” Sesuai dengan pendapat informan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa menurut pandangan peneliti menggunakan indikator interaksi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum mampu mempengaruhi masyarakat Kota Pangkalpinang dalam menjalankan pemilihan umum secara bersih.

3.3. Aktor

Aktor merupakan peran yang secara langsung berkolaborasi dan mengenali medan yang dihadapi. Aktor yang dimaksud disini ialah peran dari pemerintah dan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi politik, bentuk kolaborasi yang dimaksud adalah membangun sebuah kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjadinya penyesuaian terhadap kondisi di lapangan. Dalam membangun sebuah kepercayaan tentu saja bukan hal yang bisa di sepelekan karena setiap manusia memiliki ego masing-masing dan kepentingan masing-masing, maka dengan demikian perlunya intensitas dalam menjalin hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. terdapat beberapa organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu jalannya Pendidikan Politik di Kota Pangkalpinang. Menurut observasi yang peneliti lakukan masih banyak masyarakat yang belum tau akan keberadaan organisasi ini. Maka dengan demikian unsur dari seorang aktor yaitu pemerintah sangatlah penting dalam menjalankan pendidikan politik, peranan pemerintah juga harus selaras dan komitmen dengan apa yang ingin dituju, tak hanya pemerintah masyarakat pun berperan besar dalam proses berjalannya politik dalam hidup bernegara. Pada dasarnya semua pilihan akan kembali berdasarkan suara dari masyarakat dengan di dorongnya sikap saling membutuhkan, karena halnya setiap pihak pasti mempunyai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri dan perlu adanya campur tangan pihak lain.

Merupakan peranan yang mampu mempengaruhi lingkungan disekitarnya dan bertindak sebagai pelaku utama, aktor yang dimaksud disini ialah peran dari pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi politik, sehingga menciptakan kolaborasi antara pemerintah untuk membangun sebuah kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

Sesuai dengan yang telah di lakukan peneliti dalam penelitian terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan Pendidikan politik terhadap masyarakat di Kota Pangkalpinang, peneliti menggunakan berbagai indikator untuk membuktikan apakah upaya yang di lakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sesuai dengan menggunakan dimensi aktor, maka dapat di jelaskan sebagai berikut;

a. Indikator Pemerintah

Sesuai dengan tabel 4.5 peneliti melakukan pengamatan terkait pendidikan politik yang di jalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang bahwasanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang telah menjalankan perannya sebagai pelaku utama dalam melaksanakan Pendidikan Politik, digambarkan pada tabel 4.7 yang dimana pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki target untuk memberikan Pendidikan politik secara khusus terhadap target tersebut, dengan harapan target mampu menjadi gerakan perubahan bagi kalangan masyarakat. Kemudian peneliti menarik gambaran bahwasanya peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan politik terhadap masyarakat sudah dijalankan sesuai dengan prosedur dan wewenang yang diberikan. Maka peneliti menggunakan indikator pemerintah melihat ada upaya besar yang di lakukan pemerintah dalam melaksanakan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat.

b. Indikator Masyarakat

Pada dasarnya manusia memiliki berbagai pola pikir yang berbeda-beda, terkait peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Pendidikan Politik bagi masyarakat Kota Pangkalpinang peneliti menggunakan indikator masyarakat dalam menjalankan penelitian, disini peneliti mendapatkan beberapa fakta yang dimana tingkat egoisme manusia tidak dapat di takar oleh benda apa pun. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan politik peneliti telah melihat berbagai upaya

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik kepada masyarakat yang sudah baik, namun, sesuai dengan pendapat yang di berikan oleh informan Pak Karim saat dilakukannya wawancara pada tanggal 15 Januari 2023, beliau menyampaikan bahwa:

pada saat pilkada 2018 seseorang datang kerumah dan memberikan amplop kepada saya dengan alasan ongkos buat saya untuk jalan ke TPS dengan iming-iming memilih salah satu calon yang beliau sarankan, dan pada akhirnya saya ambil uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, pada akhirnya saya melakukan golput karena saya telah diuntungkan pada hari itu.

Dengan demikian berdasarkan pandangan peneliti menggunakan indikator masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah masih memiliki kelemahan yaitu masyarakatnya sendiri. Maka peneliti menarik kesimpulan di dalam indikator ini pemerintah masih belum bisa menjaga stabilitas politik di beberapa kalangan masyarakat.

c. Indikator Media

Sesuai dengan penjelasan pada gambar 4.5 peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah tergambar dengan jelas bahwa bila di lihat menggunakan indikator media sebagai bahan penilaian maka, Senada dengan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik betul adanya upaya dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjaga komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah melalui media sosial. Selain itu terdapat layanan masyarakat berupa kritikan maupun saran online di website tersebut agar mempermudah masyarakat menyampaikan masukan terhadap pemerintah dengan harapan kepekaan masyarakat terhadap jalanya politik di Kota Pangkalpinang meningkat.

Mengacu terhadap dimensi yang di gunakan pada saat penelitian maka terlihat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik di Kota Pangkalpinang.

3.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dapat menghambat program pendidikan politik, apalagi pada saat ini mayoritas suara pemilih dipegang oleh pemilih muda yang notabenehnya melek teknologi. Apabila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tidak melakukan inovasi pendidikan politik berupa aplikasi, maka dipastikan mengurangi minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik. faktor penghambat lainnya adalah kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan yang di berikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam konteks penelitian ini, minimnya partisipasi masyarakat dimaksudkan partisipasi dalam hal keikutsertaan menjadi panitia ataupun pelaksana pendidikan politik.

Faktor Pendukung dalam menjalankan pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendidikan politik terhadap masyarakat dengan didasari wewenang penuh di tangan pemerintah, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu lebih fleksibel dalam menjalankan Pendidikan Politik di Kota Pangkalpinang, adanya organisasi masyarakat yang berperan dalam membantu jalannya pendidikan politik memberikan suatu keuntungan yang mempermudah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan pendidikan politik dengan bantuan dari pihak Organisasi Masyarakat. Adanya koordinasi yang di lakukan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi lain merupakan langkah yang berperan baik dalam menjalankan Pendidikan Politik, karena di nilai mampu saling membantu disetiap jalannya pendidikan politik yang dilaksanakan dan dukungan dari media yang mempermudah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan Pendidikan Politik kepada masyarakat secara mudah tanpa harus bertemu langsung dengan masyarakat.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu masih banyak masyarakat yang belum sepaham dengan maksud dan tujuan pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Politik, sehingga masyarakat masih menggunakan ego masing-masing dalam mengambil tindakan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah di jalankan oleh peneliti terkait Pendidikan politik di Kota Pangkalpinang, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan pendidikan politik di Kota Pangkalpinang sudah baik dengan adanya sosialisasi yang telah di lakukan oleh Badan Kesbangpol,

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pendidikan politik di Kota Pangkalpinang seperti koordinasi yang baik antar pegawai, pendekatan yang humanis, dan sarana, prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, yaitu: pemerintah masih belum mampu mempengaruhi beberapa masyarakat, dan sikap egois masyarakat yang masih tinggi

Upaya yang telah di lakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi landasan yang kuat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar peneliti tidak terfokus terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan khusus atau disabilitas. Maka untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat membahas Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, karen mereka juga memerlukan pendidikan politik sehingga hak dan suara yang dia miliki dapat tersampaikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membantu dalam menjalankan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Deswanda, I., & Wicaksono, B. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Yang Cerdas Dan Berintegritas Tahun 2018. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 1-12.

Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 35-45.

Hidayat, R. (2021). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Repository Muhammadiyah Mataram, 20-35.

Ihara Stabilitas Politik: Studi Tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Dalam Memelihara Stabilitas Politik. Universitas Airlangga, 30-45.

Rahmawati, A. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 52-72.

Kartono, K. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Madar Maju.

Mardalis. (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.

Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.

Ismawan, I. (1999). Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu .

Yogyakarta: Media Pressindo.

Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.

2004: Sinar Baru Algensindo.

